



L A P O R A N

SURVEI PERSEPSI KORUPSI



DI PENGADILAN NEGERI NAMLEA KELAS II

TRIWULAN KETIGA

PERIODE JULI S.D. SEPTEMBER TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI NAMLEA

Jln. Do Bin Thalib, Namlea, Kabupaten Buru - 97571

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI
Pengadilan Negeri Namlea Kelas II
Triwulan Ketiga
Periode Juli sampai dengan September 2025

Disahkan di Namlea
Pada Hari Senin, 27 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Namlea,



Hairuddin Tomu, S.H., M.H.
NIP. 19770616 200502 1 001

Ketua Tim Survei,



Hendra Kesaulya, S.H.
NIP. 19760531 200604 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Masyarakat Maluku sangat membutuhkan informasi serta pelayanan prima dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Namlea Kelas II mengadakan survei ini.

Survei ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan survei yang kami jalankan beserta laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik.

Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi semua pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Namlea Kelas II dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Namlea Kelas II.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Namlea, 27 Oktober 2025



Ketua Tim Survei

DAFTAR NAMA TIM SURVEI

Ketua:

HENDRA KESAULYA, S.H.

Anggota:

ETLY JANTJE LESSIL, S.H.

ALFREDO STEVIO TITAHELUW, S.H

HILDA RACHEL PEEA, S.E., S.H

ANDY KURNIAWAN SEBAYANG, A.Md.T

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR NAMA TIM SURVEI	iv
DAFTAR ISI	v
DARTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja Pelaksanaan	3
1.4.1. Persiapan	3
1.4.2. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	4
1.4.3. Metode Survei	5
BAB II	6
METODOLOGI	6
2.1. Metode Penelitian	6
2.2. Populasi dan Sampel	6
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	7
2.5. Teknik Analisis Data	7
2.6. Tahapan Pelaksanaan	8
BAB III	10
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	10
3.1. Profil Responden	10
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden	10
3.1.2. Pekerjaan Responden	11

3.1.3.	Kelompok Usia Responden	12
3.2.	Indeks Persepsi Korupsi per Indikator	13
3.2.1.	Indikator Manipulasi Peraturan	13
3.2.2.	Indikator Penyalahgunaan Jabatan	14
3.2.3.	Indikator Menjual Pengaruh	15
3.2.4.	Indikator Transaksi Biaya	15
3.2.5.	Indikator Biaya Tambahan	16
3.2.6.	Indikator Hadiah	17
3.2.7.	Indikator Transparansi Biaya	18
3.2.8.	Indikator Percaloan	19
3.2.9.	Indikator Perbuatan Curang	20
3.2.10.	Indikator Transaksi Rahasia	21
3.3.	Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan	22
3.4.	Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II	24
BAB IV		25
PENUTUP		25
4.1.	Kesimpulan	25
4.2.	Rekomendasi	26
DAFTAR PUSTAKA		ix
LAMPIRAN		x

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. Jadwal Pelaksanaan.....	4
2. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi	9
3. Nilai Persepsi	9
4. Tingkat Pendidikan Responden.....	10
5. Pekerjaan Responden	11
6. Kelompok Usia Responden	12
7. Indeks pada indikator manipulasi peraturan	13
8. Indeks pada penyalahgunaan jabatan	14
9. Indeks pada indikator menjual pengaruh	15
10. Indeks pada indikator transaksi biaya	16
11. Indeks pada indikator biaya tambahan	17
12. Indeks pada indikator hadiah	18
13. Indeks pada indikator transparansi biaya	19
14. Indeks pada indikator percaloan	20
15. Indeks pada indikator perbuatan curang	21
16. Indeks pada indikator transaksi rahasia.....	22
17. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II.....	23

DAFTAR GAMBAR

<i>No. Gambar</i>	<i>Halaman</i>
1. Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas	8
2. Tingkat Pendidikan Responden	10
3. Pekerjaan Responden	11
4. Kelompok Usia Responden	12
5. Indeks pada indikator manipulasi peraturan	13
6. Indeks pada penyalahgunaan jabatan	14
7. Indeks pada indikator menjual pengaruh	15
8. Indeks pada indikator transaksi biaya	16
9. Indeks pada indikator biaya tambahan	17
10. Indeks pada indikator hadiah	18
11. Indeks pada indikator transparansi biaya	19
12. Indeks pada indikator percaloan	20
13. Indeks pada indikator perbuatan curang	21
14. Indeks pada indikator transaksi rahasia	22
15. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap

dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Pengadilan Negeri Namlea Kelas II telah menerapkan e-survei dengan yaitu dengan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) Direktorat Badan Peradilan Umum yang diberlakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Eletronik Terpadu (LENTERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) Di Lingkungan Peradilan Umum tanggal 8 April 2021 dan khusus untuk Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II alamat SISUPER dapat diakses pada browser dengan alamat <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/401930>.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

Landasan Hukum Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Eletronik Terpadu (LENTERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) Di Lingkungan Peradilan Umum.

1.4. Rencana Kerja Pelaksanaan

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana.
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan.
 - a. Kuesioner;
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar;

- c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
 - a. Jumlah Responden;
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal.

Penyusunan rencana dan pelaksanaan Survei ini dijadwalkan pada bulan Juli sampai dengan September 2025. Adapun waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dapat dilihat pada jadwal berikut ini:

Tabel 1
Jadwal Pelaksanaan

No	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Persiapan	2 Juli 2025
2	Survei IPK	2 Juli – 27 September 2025
3	Pelaksanaan Pengumpulan Data	22 Oktober 2025
4	Pengolahan Data Indeks	22 Oktober 2025
5	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	22 Oktober 2025

1.4.2. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner;
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan;
- Pengujian kualitas dan validitas data;
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan, 4 (empat) kali dalam satu tahun. Sebagai sampel pada penelitian ini berjumlah 58 orang responden yang diambil dengan teknik simple random sampling (sampel acak sederhana). Jumlah tersebut diperoleh dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah Pengunjung rata-rata per 5 hari adalah 5 orang.
2. Jumlah Responden adalah 5 orang setiap 5 hari kerja, dengan demikian $5 / 5 = 1$.
3. Pengambilan sampel selama 58 hari kerja, dengan demikian $58 \text{ orang} / 1 = 58 \text{ orang responden}$.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Namlea Kelas II. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan

fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Kelas II.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control*

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

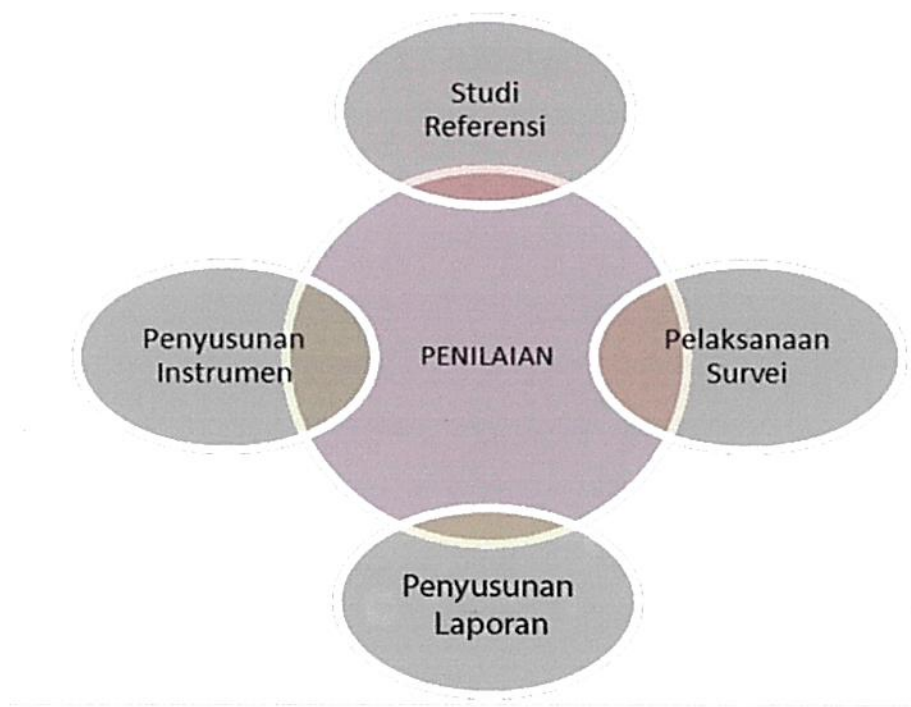
Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1.
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	4	Bersih dari Korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

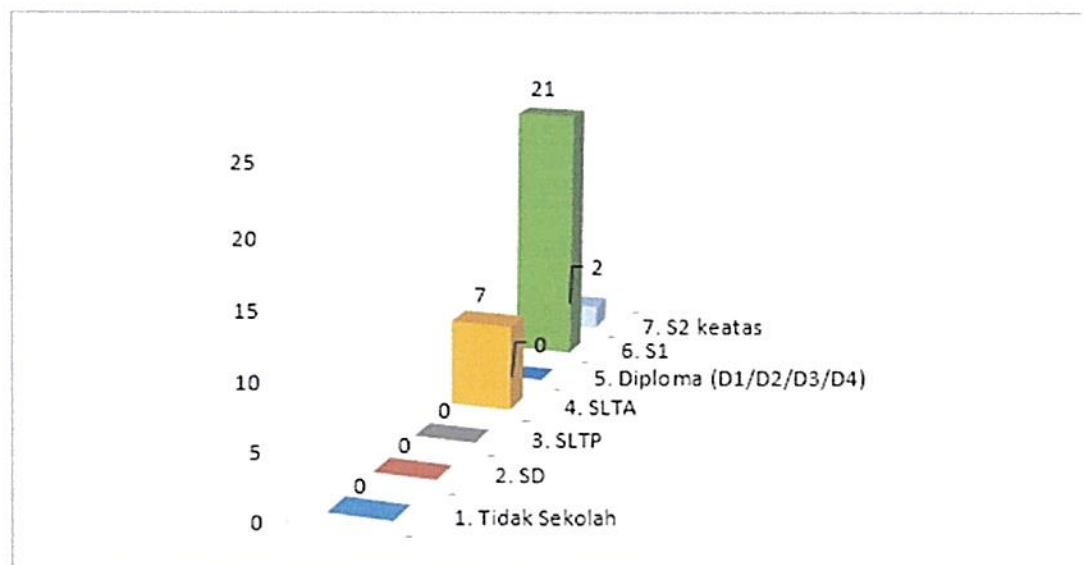
Data profil responden berdasarkan karakteristik Tingkat Pendidikan Responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Responden

KLASIFIKASI	JUMLAH	PERSEN
1. Tidak Sekolah	0	0,00%
2. SD	0	0,00%
3. SLTP	0	0,00%
4. SLTA	7	23,33%
5. Diploma (D1/D2/D3/D4)	0	0,00%
6. S1	21	70,00%
7. S2 keatas	2	6,67%
TOTAL	30	100,00%

Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan yang diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 2
Tingkat Pendidikan Responden

Mayoritas Pendidikan Responden pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II adalah S1 dengan jumlah 21 orang (70%) dari total 30 responden.

3.1.2. Pekerjaan Responden

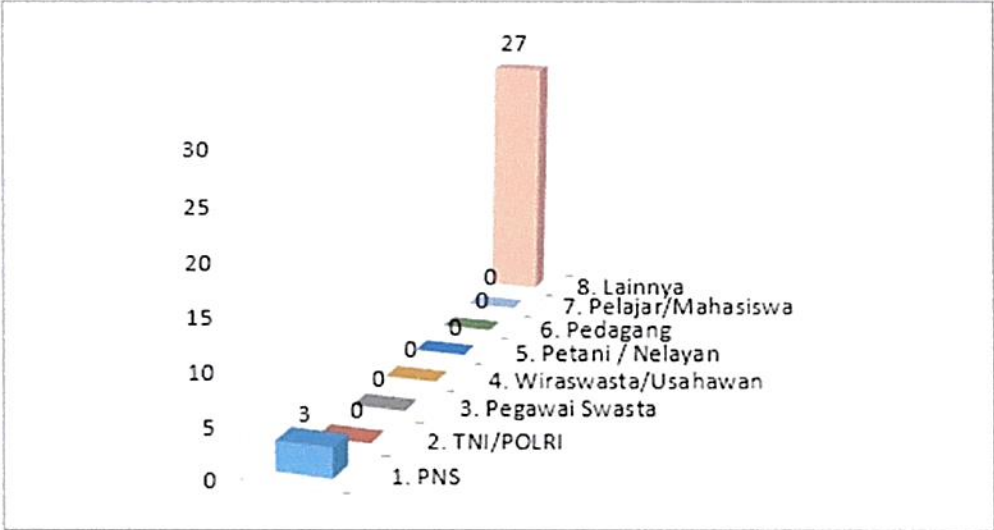
Data profil responden berdasarkan karakteristik Pekerjaan Responden adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Pekerjaan Responden

KLASIFIKASI	JUMLAH	PERSEN
1. PNS	3	10,00%
2. TNI/POLRI	0	0,00%
3. Pegawai Swasta	0	0,00%
4. Wiraswasta/Usahawan	0	0,00%
5. Petani / Nelayan	0	0,00%
6. Pedagang	0	0,00%
7. Pelajar/Mahasiswa	0	0,00%
8. Lainnya	27	90,00%
TOTAL	30	100,00%

Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan yang diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 3
Pekerjaan Responden

Mayoritas Pekerjaan Responden pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II adalah Lainnya yang berjumlah 27 orang (90,00%) dari total 30 responden.

3.1.3. Kelompok Usia Responden

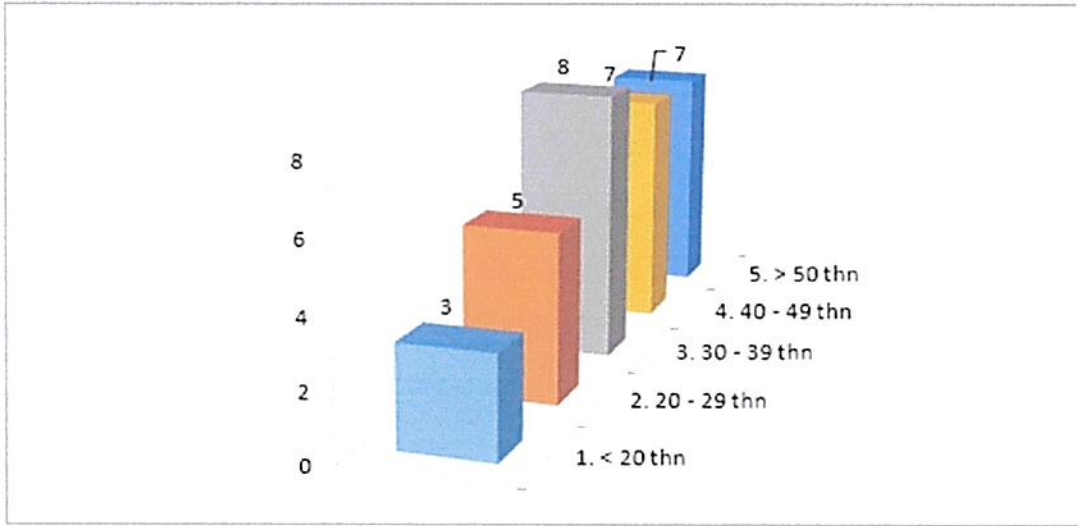
Data profil responden berdasarkan karakteristik Kelompok Usia Responden adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Kelompok Usia Responden

KLASIFIKASI	JUMLAH	PERSEN
1. < 20 thn	3	10,00%
2. 20 - 29 thn	5	16,67%
3. 30 - 39 thn	8	26,67%
4. 40 - 49 thn	7	23,33%
5. > 50 thn	7	23,33%
TOTAL	58	100,00%

Sumber Data : Hasil Penelitian lapangan yang diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 4
Kelompok Usia Responden

Mayoritas Usia Responden pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II adalah diantara umur 30 sampai dengan 39

tahun yang berjumlah 8 orang (26,67%) dari total responden 30 orang.

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,93.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II bersih dari korupsi.

Tabel 7.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Frekuensi			
		Skor	Nominal F	Nilai Perunsur	% (Persen)
1.	Selalu	4	28	112	93,33333
2.	Sering	3	2	6	6,66667
3.	Jarang	2	0	0	0
4.	Tidak ada	1	0	0	0
Jumlah			30	118	
Nilai Rata-Rata Skor			3,933333333		

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 5
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

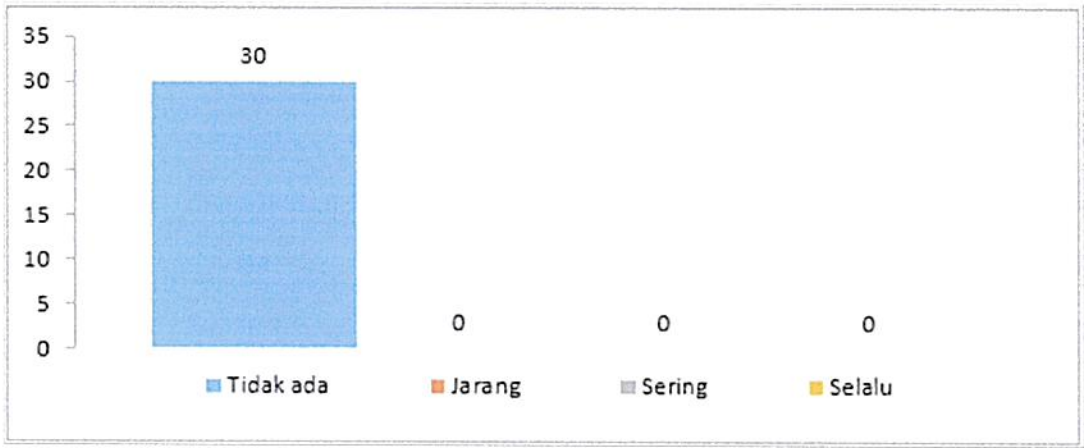
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II bersih dari korupsi.

Tabel 8.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Jawaban	Frekuensi			
		Skor	Nominal F	Nilai Perunsur	% (Persen)
1.	Tidak ada	4	30	120	100
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			30	120	
Nilai Rata-Rata Skor			4		

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 6
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

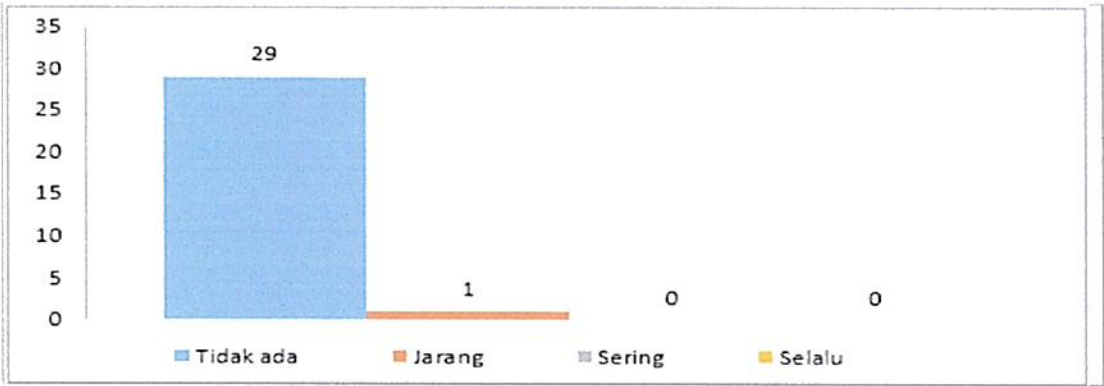
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,967.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II bersih dari korupsi.

Tabel 9.
Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	Frekuensi			
		Skor	Nominal F	Nilai Perunsur	% (Persen)
1.	Tidak ada	4	29	116	96,66667
2.	Jarang	3	1	3	3,333333
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			30	119	
Nilai Rata-Rata Skor			3,966666667		

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 7
Indeks pada indikator menjual pengaruh

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

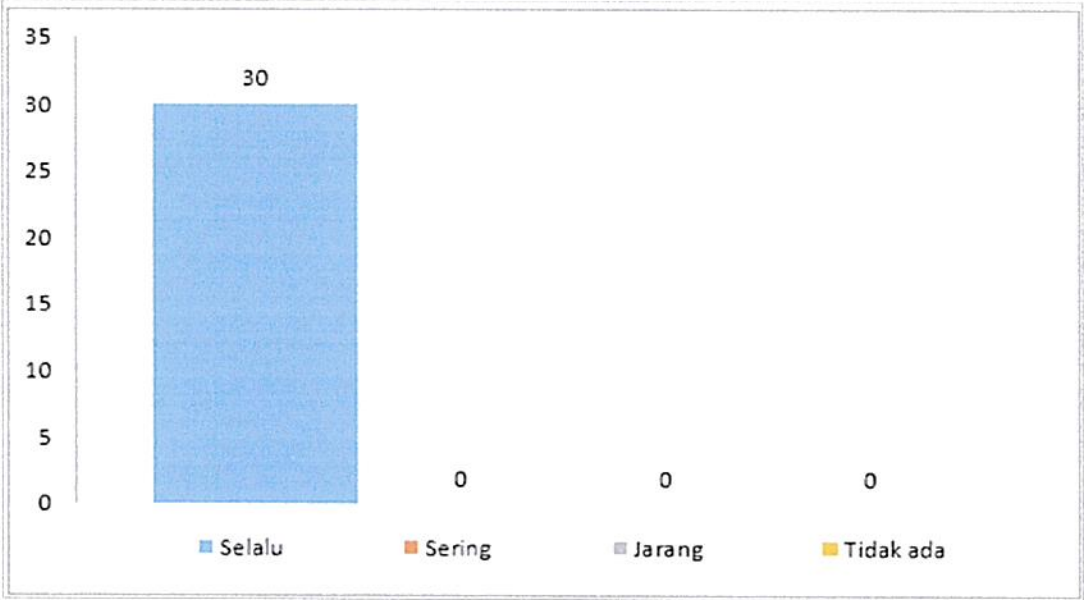
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II bersih dari korupsi.

Tabel 10.
Indeks pada indikator transaksi biaya

No.	Jawaban	Frekuensi			
		Skor	Nominal F	Nilai Perunsur	% (Persen)
1.	Selalu	4	30	120	100
2.	Sering	3	0	0	0
3.	Jarang	2	0	0	0
4.	Tidak ada	1	0	0	0
Jumlah			30	120	
Nilai Rata-Rata Skor			4		

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 8
Indeks pada indikator transaksi biaya

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 4.

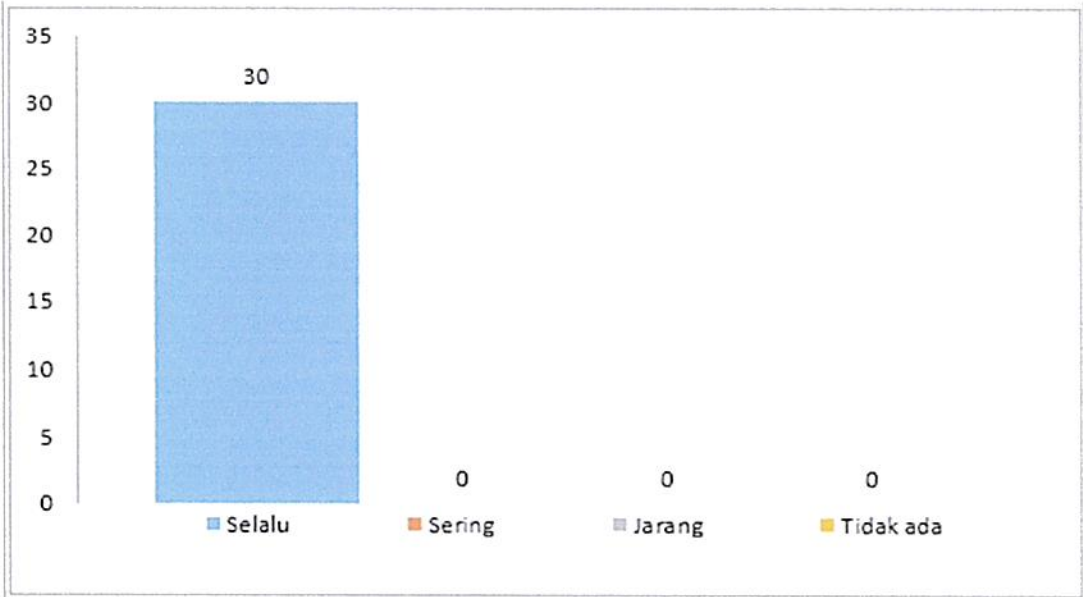
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja

pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II bersih dari korupsi.

Tabel 11.
Indeks pada indikator biaya tambahan

No.	Jawaban	Frekuensi			
		Skor	Nominal F	Nilai Perunsur	% (Persen)
1.	Selalu	4	30	120	100
2.	Sering	3	0	0	0
3.	Jarang	2	0	0	0
4.	Tidak ada	1	0	0	0
Jumlah			30	120	
Nilai Rata-Rata Skor			4		

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 9
Indeks pada indikator Biaya Tambahan

3.2.6. Indikator Hadiah

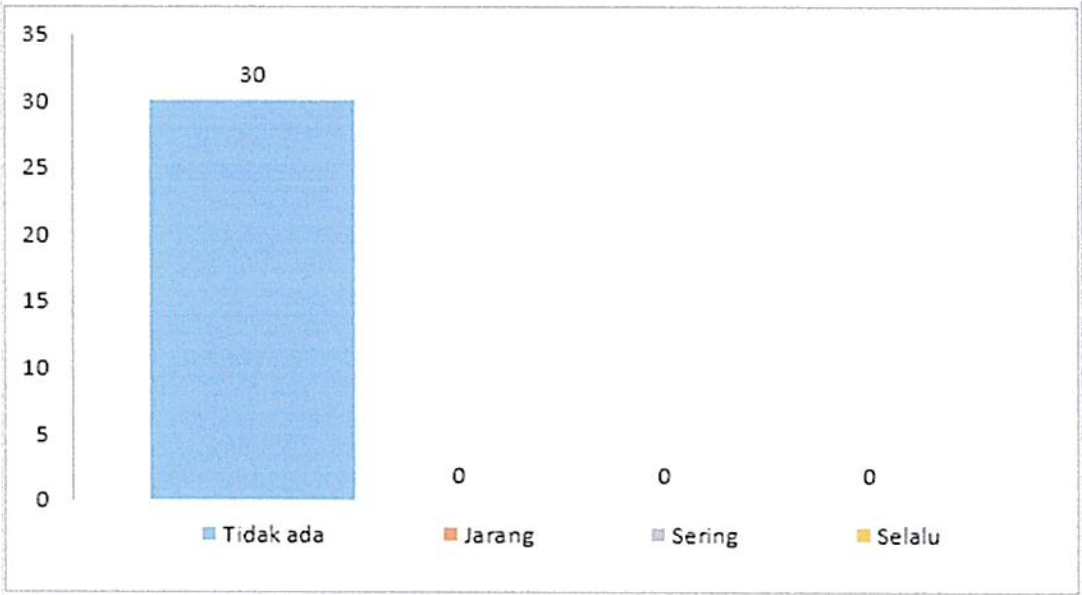
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II bersih dari korupsi.

Tabel 12.
Indeks pada indikator hadiah

No.	Jawaban	Frekuensi			
		Skor	Nominal F	Nilai Perunsur	% (Persen)
1.	Tidak ada	4	30	120	100
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			30	120	30
Nilai Rata-Rata Skor			4		

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 10
Indeks pada indikator hadiah

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

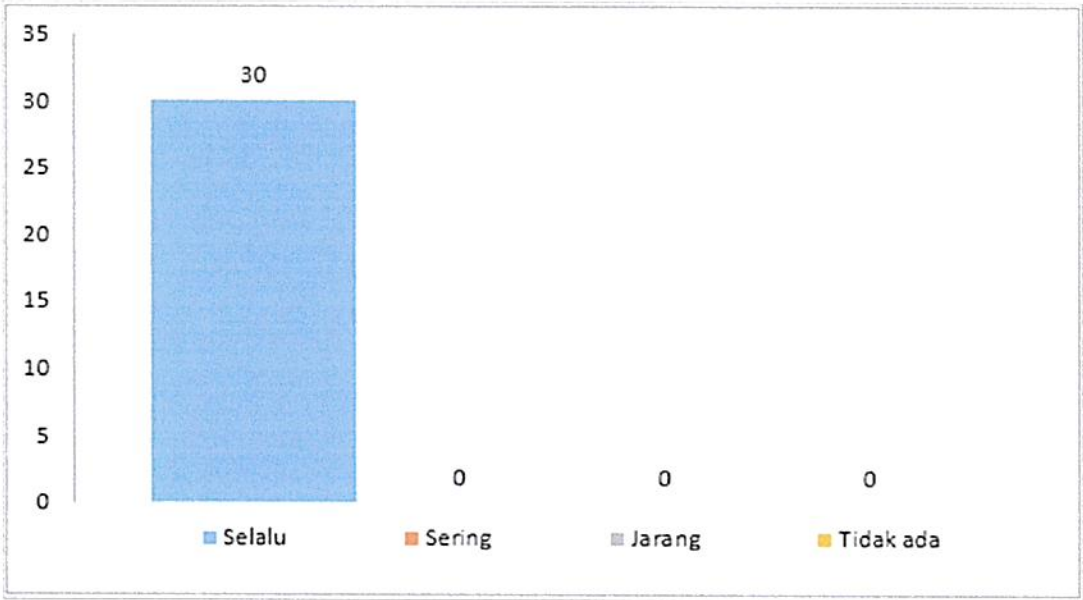
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II bersih dari korupsi.

Tabel 13.
Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	Frekuensi			
		Skor	Nominal F	Nilai Perunsur	% (Persen)
1.	Selalu	4	30	120	100
2.	Sering	3	0	0	0
3.	Jarang	2	0	0	0
4.	Tidak ada	1	0	0	0
Jumlah			30	120	30
Nilai Rata-Rata Skor			4		

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 11
Indeks pada indikator transparansi biaya

3.2.8. Indikator Percaloan

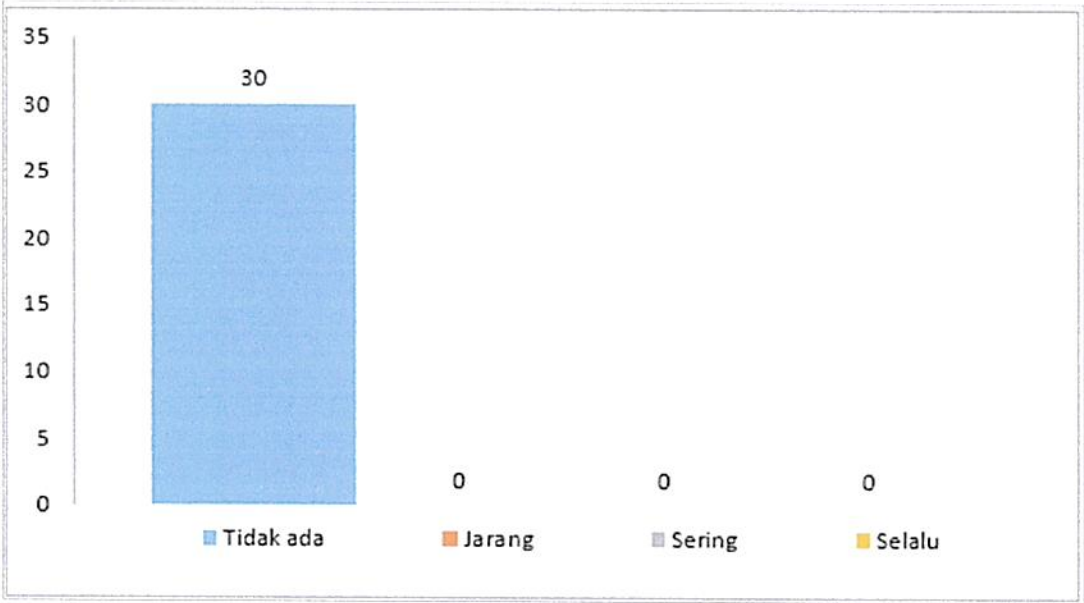
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II bersih dari korupsi.

Tabel 14.
Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Frekuensi			
		Skor	Nominal F	Nilai Perunsur	% (Persen)
1.	Tidak ada	4	30	120	100
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			30	120	
Nilai Rata-Rata Skor			4		

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 12
Indeks pada indikator percaloan

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

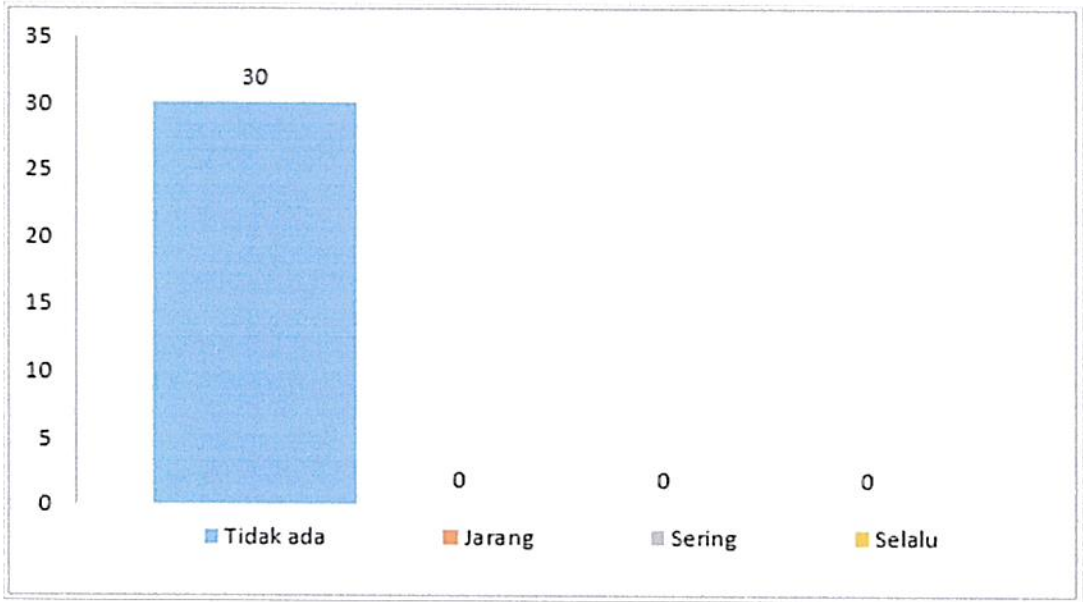
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II bersih dari korupsi.

Tabel 15.
Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Jawaban	Frekuensi			
		Skor	Nominal F	Nilai Perunsur	% (Persen)
1.	Tidak ada	4	30	120	100
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			30	120	
Nilai Rata-Rata Skor			4		

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 13
Indeks pada indikator perbuatan curang

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II bersih dari korupsi.

Tabel 17.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II

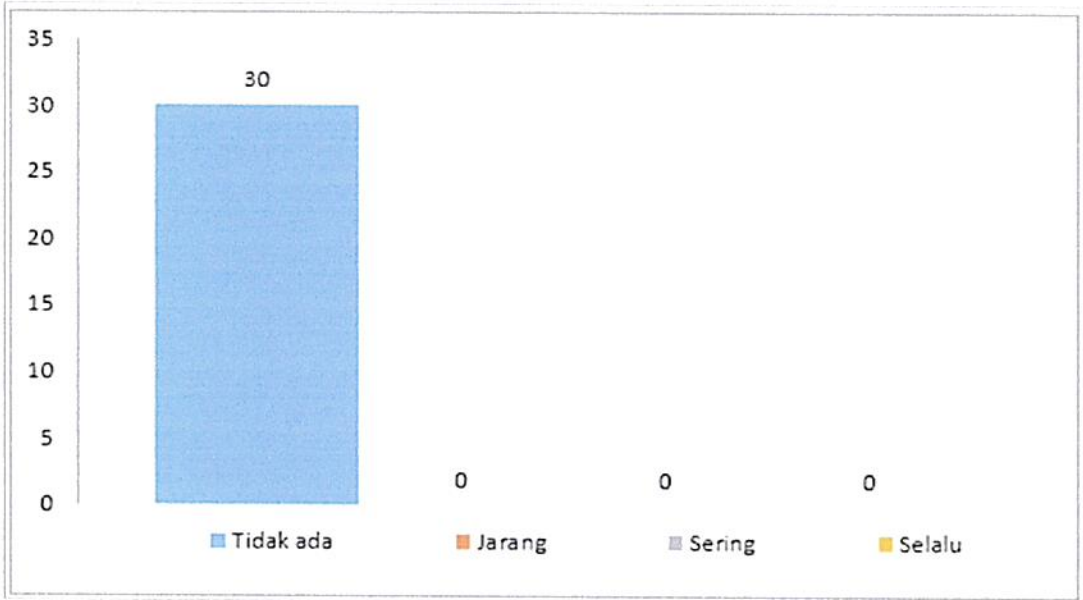
No.	UNSUR PELAYANAN	NRR PER RL	NRR TERTIMBANG	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3,933	0,393	A (Bersih dari Korupsi)	9
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
3	Menjual Pengaruh	3,967	0,397	A (Bersih dari Korupsi)	8
4	Transaksi Biaya	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
5	Biaya Tambahan	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
6	Hadiah	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
7	Transparansi Biaya	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
8	Percaloan	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
9	Perbuatan Curang	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
10	Transaksi Rahasia	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
Jumlah		3,99			
IPK		99,75			

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Tabel 16.
Indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Jawaban	Frekuensi			
		Skor	Nominal F	Nilai Perunsur	% (Persen)
1.	Tidak ada	4	30	120	100
2.	Jarang	3	0	0	0
3.	Sering	2	0	0	0
4.	Selalu	1	0	0	0
Jumlah			30	120	
Nilai Rata-Rata Skor			4		

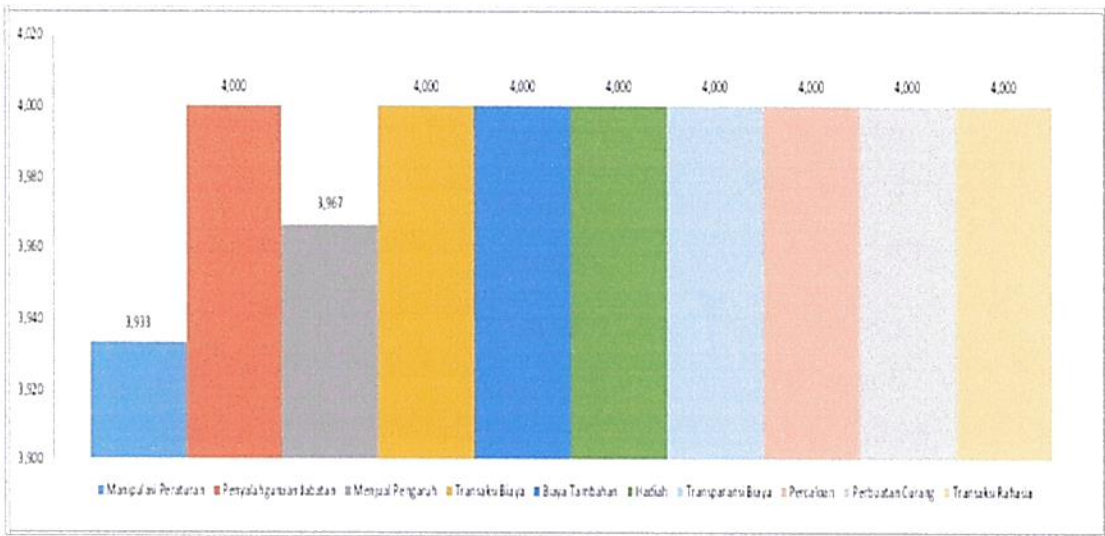
Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 14
Indeks pada indikator transaksi rahasia

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Namlea Kelas II sebesar 99,75.



Gambar 15
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II

Indeks 3,99 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 99,75.

Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa terdapat 8 unsur yang memperoleh nilai sempurna atau maksimal (4,00). Dari tabel di atas juga dapat diketahui hanya ada 2 unsur penilaian yang tidak mendapatkan nilai sempurna yaitu Manipulasi Peraturan dan Menjual Pengaruh.

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan

Selain memberikan *output* skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II. Secara umum para responden menjawab kesan dan pesan yaitu sangat baik dalam pelayanan dan tidak ada kritik dari para Responden.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil Survei Persepsi Korupsi periode Juli sampai dengan September 2025 yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Namlea Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi 99,75 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	UNSUR PELAYANAN	NRR PER RL	NRR TERTIMBANG	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3,933	0,393	A (Bersih dari Korupsi)	9
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
3	Menjual Pengaruh	3,967	0,397	A (Bersih dari Korupsi)	8
4	Transaksi Biaya	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
5	Biaya Tambahan	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
6	Hadiah	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
7	Transparansi Biaya	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
8	Percaloan	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
9	Perbuatan Curang	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1

10	Transaksi Rahasia	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
Jumlah		4,00			
IPK		99,91			

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Namlea mendapatkan hasil 99,75. Pada periode Juli sampai dengan September 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa terdapat 8 unsur yang memperoleh nilai sempurna atau maksimal (4,00). Juga dapat diketahui hanya ada 2 unsur penilaian yang tidak mendapatkan nilai sempurna yaitu Manipulasi Peraturan dan Menjual Pengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Ridwan. 2008. Dasar-dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.
- Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset. Yogyakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Layanan Elektronik Terpadu (LENTERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas pada seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

LAMPIRAN

Data profil responden dan analisa data Pengadilan Negeri Namlea Kelas II pada Triwulan Ketiga periode Bulan Juli sampai dengan September 2025 dapat dilihat pada screenshot gambar pada Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) sebagai berikut:

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
1	Hirmawan Saleh, SH R-401930-IPAK-0CFE20837C No. HP 082239503610	MALUKU	40 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 September 2025
2	Muhammad Rada, S.H R-401930-IPAK-5AE61CDA9A No. HP 081381931642	MALUKU	61 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 September 2025
3	Jufri Solisa, SH R-401930-IPAK-172058FFD3 No. HP 082398001198	MALUKU	38 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 September 2025
4	La Rono Siompo, SH R-401930-IPAK-CE7611A700 No. HP 081248145570	MALUKU	30 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 September 2025
5	Alwi Kille R-401930-IPAK-707DE0DB01 No. HP 082248427396	MALUKU	60 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 September 2025
6	Rizky Kaim Ruma R-401930-IPAK-4AA5A360F0 No. HP 0891654015	MALUKU	18 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29 September 2025
7	Muhamad Isra Pontho R-401930-IPAK-E74BD8F4E4 No. HP 082238500905	MALUKU	23 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29 September 2025
8	Muhammad Fadhlih Kondong R-401930-IPAK-D964E23A0C No. HP 081343179822	MALUKU	22 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29 September 2025

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
9	Nabil Abiyasha R-401930- IPAK- D2CB6B22A7 No. HP 082261446277	MALUKU	22 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29 September 2025
10	Aryo Wahyudi Umasugi R-401930- IPAK- 3489EDEF1 No. HP 085349796369	MALUKU	19 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29 September 2025
11	Muh. Aldy Shaktiawan R-401930- IPAK- B64C7899D6 No. HP 082246510155	MALUKU	19 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29 September 2025
12	Ajid Titahelu, S.H. R-401930- IPAK- AB7C4BFDA2 No. HP 81243035232	MALUKU	42 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Agustus 2025
13	Mustafa Latuconsina,S. H. R-401930- IPAK- 8CE4150B84 No. HP 81298461191	MALUKU	47 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Agustus 2025
14	La Eko Lapandewa, S. Hi.,M.H. R-401930- IPAK- 9E8BCE6C34 No. HP 82250992685	MALUKU	37 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Agustus 2025
15	Umar Alkatiri, S.H. R-401930- IPAK- 3C59985ACF No. HP 85244151664	MALUKU	50 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Agustus 2025
16	Nurlaila Koroy R-401930- IPAK- 401CF1CDCE No. HP 082197607070	MALUKU	38 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Agustus 2025
17	Sofian Malik, S.H.,M.H. R-401930-	MALUKU	50 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Agustus 2025

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
	IPAK-1F7BF989A6 No. HP 82398755665														
18	Ajid Titahelu, S.H. R-401930-IPAK-1D1AD63FD8 No. HP 8124303532	MALUKU	42 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Agustus 2025
19	Sara K. Pattisahusiwa, S.H. R-401930-IPAK-EAC68BB9DD No. HP 8124842379	MALUKU	26 Tahun Perempuan	S1TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Juli 2025
20	Hirmawan Saleh, SH R-401930-IPAK-0F2C68ED12 No. HP 82239503610	MALUKU	42 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Juli 2025
21	Nurdhalifa R-401930-IPAK-8CEEE8C3B1 No. HP 81241410809	MALUKU	34 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24 Juli 2025
22	Irfan Fahmi Asgar, S.H. R-401930-IPAK-2735A7D353 No. HP 81340067900	MALUKU	31 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juli 2025
23	Harkuna Litiloly, S.H R-401930-IPAK-FF3EBBD1A4 No. HP 81248619223	MALUKU	43 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juli 2025
24	SYAFRENDI CHANIAGO R-401930-IPAK-D1A45206D2 No. HP 081344841098	MALUKU	45 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juli 2025
25	Sara K. Pattisahusiwa, S.H. R-401930-IPAK-.....	MALUKU	26 Tahun Perempuan	S1TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juli 2025

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
	No. HP 8124842379														
26	Ahmad Bessy, S.H. R-401930-IPAK-9600CA13B3 No. HP 81222637152	MALUKU	38 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juli 2025
27	Fahmy Lessy, S.H. R-401930-IPAK-101A221924 No. HP 81248754750	MALUKU	59 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22 Juli 2025
28	Ahmad Bessy, S.H. R-401930-IPAK-0B4305D811 No. HP 81222637152	MALUKU	38 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	21 Juli 2025
29	Zulkifli Warnangan, S. Sos R-401930-IPAK-286EDEF4CF4 No. HP 81344084967	MALUKU	53 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Juli 2025
30	Pahmi Lessy, SH R-401930-IPAK-7EEC12305E No. HP 081248759750	MALUKU	58 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Juli 2025

SISUPER IPK PENGADILAN NAMLEA

Alamat link online :
[http:// esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/401930](http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/401930)

